

REPRESENTASI TINDAK TUTUR CALON GUBERNUR SULAWESI SELATAN: ANALISIS WACANA KESOPANAN BERBAHASA

Yusri^{*)}, Yuni Handayani, dan Riskawati

Lembaga Penelitian, Universitas Negeri Makassar, Makassar 90222, Indonesia

^{*)}E-mail: yusrialdianocrew@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana representasi tuturan calon gubernur Sulawesi Selatan menjelang pemilihan gubernur tahun 2013 khususnya dalam aspek kesopanan berbahasa dan bagaimana hubungan antara budaya tutur masyarakat Sulawesi Selatan dengan maksim kesopanan berbahasa yang secara universal diikuti. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan pragmatik. Data dalam penelitian ini ialah data tertulis, yakni tuturan para calon gubernur Sulawesi Selatan yang diambil dari media cetak terbesar di Sulawesi Selatan, yakni *Harian Fajar* dan *Tribun Timur* selama 4 bulan, yaitu bulan April, Mei, Juni, dan Juli. Data yang berupa tuturan para politisi dikaji berdasarkan maksim-maksim yang secara universal diikuti untuk menunjukkan kesopanan berbahasa terhadap lawan tuturnya. Dalam melakukan pemaknaan, peneliti juga memperhatikan konteks tutur budaya masyarakat Sulawesi Selatan. Maksim-maksim yang digunakan adalah maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim penghargaan, maksim kesederhanaan, maksim pemufakatan, dan maksim simpati. Penelitian ini menemukan bahwa tuturan calon gubernur Sulawesi Selatan yang sesuai dengan maksim kesopanan berbahasa cenderung mengikuti maksim penghargaan, tuturan calon gubernur Sulawesi Selatan yang melanggar maksim kesopanan berbahasa cenderung mengikuti maksim kesederhanaan. Berdasarkan berbagai tuturan yang dianalisis, dapat dilihat bahwa tuturan calon gubernur Sulawesi Selatan cenderung sesuai dengan maksim kesopanan berbahasa. Beberapa tuturan yang diinterpretasikan dengan konteks budaya tutur masyarakat Sulawesi Selatan memperlihatkan bahwa terdapat kesesuaian antara budaya tutur masyarakat Sulawesi Selatan dengan maksim kesopanan berbahasa yang peneliti gunakan.

Representation of Speech Acts by the Governor Candidate of South Sulawesi: Politeness Discourse Analysis

Abstract

The research looks into the Governor Candidate of South Sulawesi's representation of speech acts leading up to the governor's election in 2013, in particular into politeness and the relation between cultural speech acts in South Sulawesi society and universal politeness maxim. The research is qualitative with pragmatic approach. This research uses written data from the utterances of the South Sulawesi's incumbent Governors printed in the biggest mass media in South Sulawesi—*Harian Fajar* and *Tribun Timur*—for 4 months, in April, May, June, and July. The data, in the form of utterances produced by the politicians, are analyzed based on maxims that are universally used to show politeness towards their addressees. In analyzing meanings, researchers also consider the cultural context in which speech acts occurred in South Sulawesi society. The maxim involved tact maxim, generosity maxim, approbation maxim, modesty maxim, agreement maxim, and sympathy maxim. The research finds that the utterances by the incumbent Governors of South Sulawesi conform to politeness maxim in accordance with approbation maxim, while the utterances by the governor candidate of South Sulawesi that violate the politeness maxim tend to adhere to modesty maxim. Utterances that are analyzed show that the utterances produced by the governor candidate of South Sulawesi are more likely to conform to politeness maxim. Several utterances that are interpreted within South Sulawesi cultural context of speech acts show that there is appropriateness between cultural speech act in South Sulawesi society and maxim of politeness used in this research.

Keywords: speech acts, the theory of politeness language, the governor's election Sulawesi Selatan

1. Pendahuluan

Bahasa merupakan alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Pada dasarnya, bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yakni sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, dan sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial.

Salah satu hal penting yang berkenaan dengan keberhasilan pengaturan interaksi sosial melalui bahasa adalah strategi-strategi yang mempertimbangkan status penutur dan mitra tutur. Keberhasilan penggunaan strategi-strategi ini menciptakan suasana kesopanan yang memungkinkan transaksi sosial berlangsung tanpa mempermalukan penutur dan mitra tutur (Ismari, 1995).

Kesopanan berbahasa sangat erat kaitannya dengan sebuah budaya. Kedua hal tersebut tidaklah dapat dipisahkan antara satu sama lain. Cerminan dari sebuah budaya adalah bahasa begitupun sebaliknya, budaya adalah nilai ataupun prinsip yang dapat diyakini kebenarannya dalam masyarakat penutur suatu bahasa, dan dapat menjadi panduan dalam berinteraksi dan berkomunikasi; misalnya budaya tutur masyarakat Sulawesi Selatan.

Sopan sering diartikan secara dangkal sebagai suatu tindakan yang sekedar beradab saja, namun makna yang lebih penting yang diperoleh dari suatu kesopanan merupakan mata rantai yang hilang antara prinsip kerjasama dengan masalah bagaimana mengaitkan daya dengan makna (Leech dalam Suherman, 2008)

Dalam dunia politik penggunaan bahasa yang baik sangatlah diperhatikan, misalnya dalam studi komunikasi politik antara lain yang berkaitan dengan persoalan mengkaji propaganda, kampanye politik penggunaan bahasa yang penting dan sosialisasi politik. Bahasa merupakan unsur penting dalam komunikasi politik di samping aspek komunikator, pesan, media, khalayak, dan efek.

Terbaikannya unsur kesopanan berbahasa dalam komunikasi politik dapat berakibat memanasnya hubungan antar komunikator yang terlibat. Karena itulah, aspek kesopanan berbahasa layak dibahas dalam kajian komunikasi politik.

Kajian mengenai kesopanan berbahasa dalam penelitian ini sangatlah penting untuk dilakukan. Kesopanan berbahasa ini nantinya dapat dijadikan sebagai strategi penghindaran konflik yang terjadi antara penutur dan mitra tutur. Konsep kesopanan berbahasa sebagai

pengacuan sosial bersifat universal dan secara efektif berfungsi sebagai mekanisme pengacuan sosial.

Untuk mengetahui apakah sebuah tuturan sesuai dengan maksim kesopanan berbahasa, maka tuturan tersebut akan dikaji dan diinterpretasi berdasarkan maksim-maksim yang secara universal diikuti. Selain itu pemaknaan tuturan juga dikaitkan dengan budaya tutur masyarakat setempat.

Kajian ini dilakukan dengan menganalisis peristiwa komunikasi politik yang pernah mendapat sorotan public, yakni persiapan para politisi, khususnya para calon gubernur Sulawesi Selatan menjelang pemilihan gubernur 2013. terkait berbagai hal yang dilakukan oleh para calon gubernur untuk mengkampanyekan dirinya.

Menjelang pemilihan gubernur, ketegangan dan suasana politik meningkat, persaingan antara satu calon gubernur dengan gubernur lainnya semakin meningkat pula (Nadar, 2009). Dalam situasi demikian, penggunaan bahasa oleh para politisi khususnya para calon gubernur Sulawesi Selatan menarik untuk diamati. Apakah tuturan para calon gubernur Sulawesi Selatan sesuai dengan maksim kesopanan berbahasa ataupun sebaliknya.

Tindak tutur. Tindak tutur merupakan sebuah analisis pragmatik yang merupakan cabang ilmu bahasa yang mengkaji bahasa dari aspek pemakaian aktualnya. Leech (1993) menyatakan bahwa pragmatik mempelajari maksud ujaran, menanyakan apa yang seseorang maksudkan dengan suatu tindak tutur dan mengaitkan makna dengan siapa berbicara kepada siapa, di mana, bilamana, bagaimana. Tindak tutur merupakan entitas yang bersifat sentral di dalam pragmatik dan juga merupakan dasar bagi analisis topik-topik lain di bidang ini seperti peranggapan, perikutan, implikatur percakapan, prinsip kerjasama dan prinsip kesopanan (Ardianto, 2011).

Leech dalam Nasution (2007) mengemukakan beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam bertindak tutur, yaitu: (1) penutur dan petutur yang berkaitan dengan usia, latar belakang sosial ekonomi, jenis kelamin dan tingkat keakraban dan sebagainya, (2) konteks tuturan yang berkaitan dengan aspek fisik atau *setting* sosial yang relevan dari tuturan bersangkutan, dan (3) tujuan tuturan, yaitu bentuk-bentuk tuturan yang diutarakan oleh penutur dan dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan tertentu. Dalam hubungan ini, bentuk tuturan yang bermacam-macam itu dapat digunakan untuk menyatakan maksud yang sama atau sebaliknya, berbagi macam maksud dapat diutarakan dengan tuturan yang sama.

Teori kesopanan berbahasa. Teori tentang kesopanan berbahasa yang banyak diacu oleh para linguis dan

pragmatis antara lain diajukan oleh Brown dan Levinson (Nadar, 2009). Kedua linguist ini mengasumsikan bahwa setiap warga masyarakat memiliki konsep muka (*face*), dan setiap warga menyadari bahwa muka tersebut dimiliki oleh warga lainnya. Setiap warga dalam berinteraksi dengan warga yang lain senantiasa menjaga dan bekerjasama untuk menghormati muka masing-masing. Konsep bahwa setiap orang memiliki muka ini berlaku secara universal walaupun tuturan apa saja yang dapat mengancam, merusak, atau mengurangi rasa hormat terhadap muka seseorang berbeda dari satu budaya ke budaya lainnya (Nadar, 2009).

Kesopanan ataupun kesantunan berbahasa secara khusus ditujukan pada pemeliharaan wajah oleh setiap orang yang terlibat dalam sebuah transaksi komunikasi, sehingga tidak ada seorang pun yang merasa wajahnya tercoreng (Goffman dalam Arisnawati, 2012)

Konsep *face want* Brown dan Levinson telah dielaborasi menjadi dua bentuk, yaitu muka *negatif want* dan muka *positif want*. *Negative face want* ialah keinginan setiap orang memiliki wilayah, hak perseorangan, hak bebas dari gangguan. *Positive face-want* ialah citra diri atau kepribadian yang konsisten dimiliki oleh masyarakat tutur berinteraksi sosial. Dalam budaya etnis Bugis Sulawesi Selatan dikenal nilai *siri'*, yaitu nilai temperamen yang sifatnya sakral dan dapat dianggap bernilai makna *relegius* (Tang, 2007).

Implikasi dari nilai ini dapat berwujud (1) *mali'u sipakainge'* 'apabila keliru, saling mengingatkan, (2) *sipakatau* atau *sipakalebbi'* 'saling menghormati, atau saling memuliakan', (3) *sibaliperri'* 'saling membantu', (4) *sisaro mase* 'saling mengasahi, (5) *tudang sipulung* 'duduk samasama' budaya urung-rembuk (Darwis, 2007; Abdurrahman, 2007).

Untuk mengetahui apakah sebuah tuturan dikatakan sopan ataupun tidak sopan, maka tuturan tersebut akan diinterpretasi dengan menggunakan maksim yang secara universal diikuti dan tentunya nantinya akan dikaitkan dengan budaya tutur masyarakat Sulawesi Selatan. Adapun contoh maksim- maksim yang secara universal diikuti untuk menunjukkan kesopanan berbahasa ialah sebagai berikut:

Maksim Kebijakan (MKEB). Maksim ini berarti kurangi atau perkecil kerugian kepada orang lain dan tambahilah atau perbesarlah keuntungan kepada pihak lain. Gagasan dari maksim kebijakan dalam prinsip kesopanan berbahasa adalah bahwa para peserta pertuturan hendaknya berpegang pada prinsip untuk selalu mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan pihak lain dalam kegiatan bertutur. Selanjutnya, apabila peserta pertuturan hendaknya selalu memperbesar kerugian pada orang

lain dan mengurangi keuntungan pihak lain, maka dapat disimpulkan bahwa tuturan tersebut melanggar maksim kebijaksanaan

Maksim Kedermawanan (MKED). Maksim ini berarti kurangi keuntungan bagi diri sendiri dan tambahilah pengorbanan bagi diri sendiri. Dengan maksim ini nantinya para peserta pertuturan diharapkan dapat menghormati orang lain. Selanjutnya, apabila peserta pertuturan berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri dan mengurangi pengorbanan bagi diri sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa tuturan tersebut melanggar maksim kedermawanan.

Maksim Penghargaan (MPENG). Maksim ini berarti kurangi kecaman pada orang lain dan tambahilah pujian pada orang lain. Dengan maksim ini diharapkan agar para peserta pertuturan tidak saling mengejek ataupun saling merendahkan pihak lain. Selanjutnya, apabila peserta pertuturan berusaha memperbesar kecaman pada orang lain dan mengurangi pujian terhadap orang lain, maka dapat disimpulkan bahwa tuturan tersebut melanggar maksim penghargaan.

Maksim Kesederhanaan (MKES). Maksim ini berarti kurangi pujian pada diri sendiri dan tambahilah kritik pada diri sendiri. Dengan maksim ini nantinya peserta tutur diharapkan dapat bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian terhadap diri sendiri. Selanjutnya apabila peserta pertuturan hendaknya memperbesar pujian pada diri sendiri dan mengurangi kritik pada diri sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa tuturan tersebut melanggar maksim kesederhanaan.

Maksim Permufakatan (MPER). Maksim ini berarti kurangi ketidaksesuaian pada diri sendiri dengan orang lain dan tingkatkan persesuaian antar diri sendiri dengan orang lain. Dengan maksim ini nantinya peserta tutur ditekankan agar dapat saling membina kecocokan atau kemufakatan antara penutur dengan orang lain. Selanjutnya apabila peserta pertuturan memperbesar ketidaksesuaian pada diri sendiri dengan orang lain dan mengurangi persesuaian antar diri sendiri dengan orang lain, maka dapat disimpulkan bahwa tuturan tersebut melanggar maksim permufakatan.

Maksim Simpati (MSIM). Maksim ini berarti kurangi antipati antara diri sendiri dengan orang lain dan perbesarlah simpati antara diri sendiri dengan orang lain. Sikap antipati terhadap salah seorang peserta tutur akan dianggap sebagai tindakan tidak santun. Selanjutnya, apabila peserta pertuturan hendaknya memperbesar antipati diri sendiri dengan orang lain dan mengurangi simpati antara diri sendiri dengan orang lain maka dapat disimpulkan bahwa tuturan tersebut melanggar maksim simpati. Dari pemaparan tersebut dapat dilihat dengan jelas perbandingan antara kesopanan berbahasa, berbagai maksim. Selanjutnya

jika suatu tuturan tidak sejalan ataupun melanggar maksim kesopanan berbahasa maka akan diberikan tanda ataupun kode X dan diletakkan dibelakang singkatan maksimnya. Misalkan sebuah tuturan yang melanggar maksim penghargaan maka diberi kode MPENGX, dan jika melanggar maksim simpati maka diberi kode MSIMX begitupun dengan maksim-maksim lainnya.

Pemilihan Gubernur Sulsel. Secara sederhana, pemilihan didefinisikan sebagai suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Pemilihan gubernur atau yang sering disingkat pilgub adalah sarana penting dalam demokrasi karena pilgub merupakan contoh partisipasi rakyat dalam berpolitik. Hal ini terjadi karena banyaknya jumlah warganegara dalam satu provinsi sehingga mereka harus menunjuk wakil untuk memimpin daerah mereka.

Dalam 4 bulan terakhir saat penelitian dilaksanakan sudah ada 3 calon gubernur Sulsel 2013-2018 yang sudah mengumumkan kesiapannya dan sudah melakukan sosialisasi dalam beberapa bulan terakhir. Calon pertama, Syahrul Yasin Limpo, saat riset dilakukan masih menjabat Gubernur Sulsel. Calon kedua, Ilham Arif Sirajuddin saat riset dilakukan masih menjabat Walikota Makassar. Calon ketiga, Andi Rudiyanto Asapa saat riset dilakukan masih menjabat Bupati Sinjai.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan pragmatik terkait dengan representasi tuturan calon gubernur Sulawesi Selatan menjelang pemilihan gubernur 2013 khususnya dari aspek kesopanan berbahasa. Tuturan-tuturan para calon gubernur dikaji dan diinterpretasikan sesuai dengan maksim-maksim yang secara universal diikuti dan dikaitkan dengan budaya tutur masyarakat Sulawesi Selatan.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber khususnya sumber data tertulis yang merupakan tuturan-tuturan yang diperoleh dalam bentuk tulisan (Nadar, 2009).

Tuturan para calon gubernur Sulawesi Selatan diambil dari media cetak terbesar di Sulawesi Selatan, yakni Harian Fajar dan Tribun Timur selama 4 bulan terakhir, yaitu bulan April, Mei, Juni dan Juli.

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan melalui teknik dokumentasi dan observasi. Dalam pengumpulan data ada tiga serangkaian kegiatan ilmiah yang harus dilalui, yakni kurun pencarian masalah, kurun penemuan masalah dan kurun pemecahan

masalah. Kurun pemecahan masalah meliputi beberapa tahapan, yakni tahap penyediaan data, menganalisis data dan penyajian analisis data (Sudaryanto, 1993).

Data yang berupa tuturan para politisi dikaji berdasarkan maksim-maksim yang secara universal diikuti untuk menunjukkan kesopanan berbahasa terhadap lawan tuturnya. Analisis data dalam penelitian ini disajikan dengan melewati proses triangulasi data yang meliputi verifikasi data untuk meninjau ulang data yang diperoleh, kemudian penyajian data dari hasil identifikasi, dan tahap yang terakhir yakni klasifikasi data. Melalui proses ini peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai tuturan-tuturan yang sesuai dengan maksim kesopanan dan tuturan-tuturan yang melanggar maksim kesopanan berbahasa.

3. Hasil dan Pembahasan

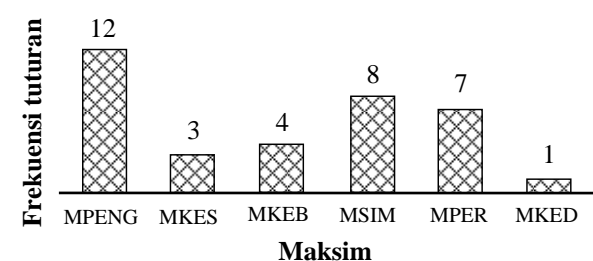
Dari berbagai tuturan calon gubernur Sulawesi Selatan yang telah diinterpretasi, terdapat beberapa tuturan yang sesuai dengan maksim kesopanan berbahasa, namun terdapat juga tuturan yang melanggar maksim kesopanan berbahasa. Kesopanan berbahasa calon gubernur Sulawesi Selatan disajikan dapat dilihat pada Tabel 1.

Calon gubernur Sulawesi Selatan cenderung mengikuti maksim penghargaan yang berarti kurangi kecaman pada orang lain dan tambahlah pujian pada orang lain (Gambar 1). Berikut adalah salah satu contoh tuturan calon gubernur Sulsel yang sesuai dengan maksim penghargaan:

“Itu sudah jadi pilihan terbaik jika PAN ternyata pilih incumbent” (Tribun Timur, 9 Juni 2012, hal. 3)

Informasi Indeksal (MPENG)

Turunan: Tuturan tersebut diungkapkan oleh salah seorang calon gubernur Sulawesi Selatan ketika Kahfi yang didampingi Wakil Sekretaris DPW PAN Sulsel Irvan AB mengumumkan penetapan salah satu pasangan calon gubernur sebagai calon usulan partai berlambang matahari terbit tersebut di hadapan wartawan di kantin DPRD Sulsel Jln. Urip Sumiharjo. Penutur mengaku tidak kecewa sama sekali atas keputusan tersebut.



Gambar 1. Tuturan yang Sesuai dengan Maksim Kesopanan Berbahasa

enjelasan: Tuturan tersebut sesuai dengan maksim penghargaan. Penutur menilai keputusan PAN memilih *incumbent* merupakan keputusan yang tepat. Dari tuturan tersebut dapat dilihat bahwa penutur berusaha untuk memberikan pujian ataupun penghargaan atas keputusan PAN.

Selain maksim penghargaan, calon gubernur Sulsel juga cenderung menggunakan maksim simpati yang berarti kurangnya antipati antara diri sendiri dengan orang lain dan perbesarlah simpati antara diri sendiri dengan orang lain. Berikut adalah salah satu contoh tuturan yang sesuai dengan maksim simpati:

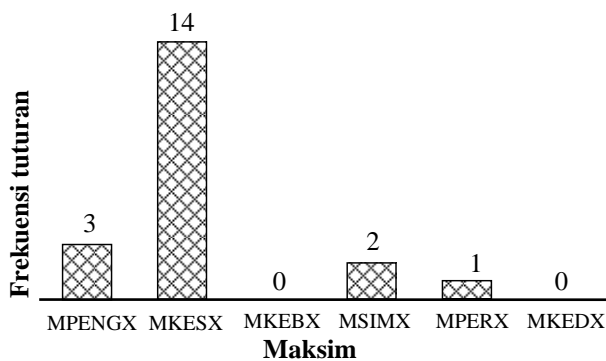
“Kita Bantuka’ , tapi saya tidak bisa janji’ apa- apa. Saya hanya bisa kerja keras (Harian Fajar, 25 Maret 2012).

Informasi Indeksal (MSIM)

Turunan: Ketika penutur melakukan *road show* di kota Bulukumba, ia berkunjung ke kediaman tokoh Golkar Bulukumba, H. Syamiruddin. Atas dukungan yang telah diberikan tokoh Golkar ini, penutur mengungkapkan bahwa pihaknya tidak menjanjikan apa-apa atas dukungan yang diberikan kepada mereka, mereka hanya bisa kerja keras untuk rakyat.

Penjelasan Tuturan tersebut sesuai dengan maksim Simpati. Dari tuturan ini dapat dilihat bahwa penutur berusaha untuk mengurangi antipati antara diri sendiri dengan orang lain dan berusaha memperbesar simpati antara diri sendiri dengan orang lain. Hal tersebut diperjelas dari tuturan penutur yang berusaha meminta simpati akan kerja keras yang akan ia berikan kepada rakyat.

Selain itu, jika dikaitkan dengan budaya tutur masyarakat Sulawesi Selatan, tuturan tersebut tergolong tuturan yang sopan, sebab tuturan tersebut sesuai dengan implikasi dari nilai *siri* yang dianut oleh masyarakat Bugis Sulawesi Selatan, terkhusus pada nilai *sipakatau* atau *sipakalebbi’* yang berarti saling menghormati, atau saling memuliakan. Hal tersebut



Gambar 2. Tuturan yang Melanggar Maksim Kesopanan Berbahasa

dapat dilihat dari penggalan tuturan *“Kita Bantuka’ , tapi saya tidak bisa janji’ apa- apa”*. Morfem “ki” pada kata “janjiki” berarti penutur berusaha untuk menghormati lawan tuturnya, lain halnya jika penutur mengatakan “janjiko”. Morfem “ko” pada kata tersebut berarti penutur tidak menghormati mitra tuturnya.

Sedangkan maksim yang jarang digunakan oleh gubernur Sulawesi Selatan ialah maksim kedermawanan yang berarti kurangi keuntungan bagi diri sendiri dan tambah pengorbanan bagi diri sendiri. Dengan maksim ini nantinya para peserta pertuturan diharapkan dapat menghormati orang lain.

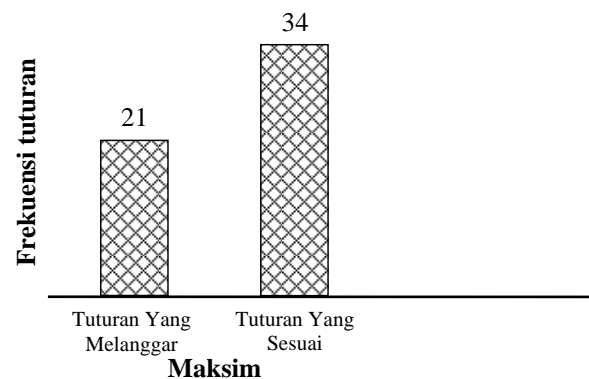
Calon gubernur Sulawesi Selatan cenderung melanggar maksim kesederhanaan (Tabel 2) yang berarti peserta penutur memperbesar pujian pada diri sendiri dan mengurangi kritik pada diri sendiri. Berikut adalah salah satu contoh tuturan yang melanggar maksim kesederhanaan:

“Saya tidak mau dibanding-bandingkan kalau lebih rendah dari saya lah. Saya mau dibandingkan yang lebih tinggi dari saya. Cari mako (Harian Fajar, 30 Juli 2012, hal 8).

Informasi Indeksal (MKESX)

Turunan: Tuturan tersebut dituturkan pada saat penutur menghadiri acara buka puasa bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Anjungan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta. Penutur tidak ingin dirinya dibandingkan dengan pejabat setingkat kepala daerah yang levelnya lebih rendah darinya. Salah satunya yaitu salah satu calon gubernur provinsi lain.

Penjelasan: Tuturan tersebut menilai bahwa calon gubernur yang diperbandingkan level dengan penutur, maka dari itu penutur menolak ketika ia harus diperbandingkan. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa tuturan itu tidak sesuai dengan maksim kesederhanaan, sebab dalam tuturannya penutur berusaha untuk memuji- muji dirinya.



Gambar 3. Perbandingan antara Tuturan yang sesuai dan yang Melanggar Maksim Kesopanan Berbahasa

Jika tuturan tersebut dikaitkan dengan budaya tutur masyarakat Sulawesi Selatan, tuturan itu tergolong tuturan yang kurang sopan, sebab tuturan tersebut tidak sesuai dengan implikasi dari nilai *siri* terkhusus pada nilai *sipakatau* atau *sipakalebbi* yang berarti saling menghormati, atau saling memuliakan. Hal tersebut dapat dilihat dari penggalan tuturan “*Saya mau dibandingkan yang lebih tinggi dari saya. Cari mako*”.

Morfem “ko” pada kata “mako” merupakan kalimat perintah yang diutarakan oleh penutur. Pada kalimat tersebut terlihat bahwa penutur tidak menghormati mitra tuturnya, lain halnya jika penutur mengatakan “*Cari meki*”. Morfem “ki” pada kata “meki” menandakan penutur memerintahkan mitra tuturnya tapi dengan konteks yang lebih sopan dibanding dengan konteks yang sebelumnya.

Calon gubernur Sulawesi Selatan cenderung mengikuti maksim kesopanan berbahasa (Tabel 3). Dari 55 buah tuturan calon gubernur Sulawesi Selatan yang dianalisis, terdapat 34 tuturan yang sesuai dengan maksim kesopanan berbahasa dan terdapat 21 tuturan yang melanggar maksim kesopanan berbahasa. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa tuturan calon gubernur Sulawesi Selatan cenderung sesuai dengan maksim kesopanan berbahasa.

Dari hasil interpretasi terhadap tuturan calon gubernur Sulawesi Selatan terlihat bahwa terdapat kesesuaian antara hasil observasi dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dari hasil observasi terlihat bahwa tuturan calon gubernur Sulawesi Selatan berusaha untuk tidak saling mengejek antar calon gubernur. Namun dalam hal ini yang terlihat adalah calon gubernur cenderung bersikap berusaha untuk memperbesar pujian terhadap diri sendiri dan mengurangi kritik pada diri sendiri.

4. Simpulan

Setelah melakukan peninjauan ilmiah dari berbagai interpretasi tuturan calon gubernur Sulawesi Selatan, dapat ditarik beberapa kesimpulan Tuturan calon gubernur Sulawesi Selatan yang sesuai dengan maksim kesopanan berbahasa cenderung mengikuti maksim penghargaan (MPENG) yang berarti kurangi kecaman pada orang lain dan tambahlah pujian pada orang lain.

Tuturan calon gubernur Sulawesi Selatan yang melanggar maksim kesopanan berbahasa cenderung mengikuti maksim kesederhanaan (MKESX) yang berarti kurangilah pujian pada diri sendiri dan tambahlah kritik pada diri sendiri. Dari beberapa tuturan yang diinterpretasikan dengan menggunakan maksim yang secara universal diikuti dapat dilihat bahwa tuturan calon gubernur Sulawesi Selatan cenderung sesuai dengan maksim kesopanan berbahasa.

Selain itu dari beberapa tuturan yang diinterpretasikan dengan konteks budaya tutur masyarakat Sulawesi Selatan terlihat bahwa terdapat kesesuaian antara budaya tutur masyarakat Sulawesi Selatan dengan maksim kesopanan berbahasa yang peneliti gunakan.

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, maka peneliti menyarankan kepada, tokoh elit politik: agar kiranya bahasa politisi yang digunakan sebaiknya sesuai dengan maksim-maksim kesopanan berbahasa agar tidak melukai pihak lain dan secara frontal bertentangan dengan pihak lain. Peneliti: kiranya dapat mengembangkan penelitian pragmatik khususnya kesopanan berbahasa tokoh elit politik. Masyarakat dapat mengetahui kapan tuturan dikatakan sesuai ataupun melanggar maksim kesopanan berbahasa sehingga nantinya masyarakat dapat memilih dengan benar tokoh elit politik yang senantiasa mengikuti maksim kesopanan berbahasa.

Daftar Acuan

- Arisawati, N. (2012). Strategi kesantunan tindak tutur penolakan dalam bahasa Makassar. *Sawerigading*, 18(1), 113—120.
- Ardianto. (2011). Ekspresi kesantunan berbahasa Indonesia mahasiswa dalam interaksi verbal di kelas: kajian etnografis komunikasi di stain Manado. *Pacific Journal*,3(1)
- Darwis, M. (2007). Hubungan antara pemertahanan Bahasa dengan Pemertahanan Budaya. *jurnal Pusat Bahasa Depdiknas Sulawesi Selatan*,8(3)
- Hasibuan, N.H. (2005). *Perangkat Tindak Tutur dan Siasat Kesantunan Berbahasa (Data Bahasa Mandailing)*. Sumatera Utara: Jurnal Ilmiah Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Sumatera Utara. Volume 2 No 1.
- Leech, G.N. (1981). *Semantics*. Harmonsworth : Penguin.
- Mackey, W.F. 1986. *Analisis Bahasa*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Nadar, F.X. (2009). *Pragmatik dan Penelitian Pragmatik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasution, K. (2007). *Tindak Tutur dan Perangkat Tindak Tutur dalam Bahasa Mandailing*. Historisme. Edisi No. 23/Tahun XI/Januari 2007. Universitas Sumatera Utara.
- Rahardi, K. (2005). *Pragmatik Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. Yogyakarta : Erlangga.

Smaradhipa, G. (2010). Bertutur dengan Tulisan diposting dari situs www.rayakultura.com. 12/05/2005.

Sudaryanto. (1993). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.

Suherman. (2008). Prinsip Kerjasama, Kesopanan dan Ironi dalam masyarakat Jepang: Sebuah Tinjauan dari Dimensi Sosiopragmatis. *Jurnal LITE*, 4(1).

Tang, M. (2007). Nilai-nilai Budaya di Dalam Sastra Daerah yang Mendasari Sekuritas Sosial Tradisional Etnis Bugis. *Jurnal Pusat Bahasa Depdiknas Sulawesi Selatan*, 8(1).